

BULETIN EDISI PEKAN KEDUA FEBRUARI 2026

# KEMENKUM KALSEL NEWS

BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM ✳️ DIVISI PELAYANAN HUKUM ✳️ DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM



## Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Mungghahan dan Silaturahmi Kemenkum RI Secara Daring, Sambut Ramadhan 1446 H



## Kanwil Kemenkum Kalsel Raih Predikat Unggul pada Penilaian AIEK Tahun 2025



## 31 Notaris Baru Dilantik, Kakanwil Kemenkum Kalsel Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Kunjungi laman kami



Terhubung lebih dekat:

YouTube Facebook Instagram X **KEMENKUMKALSEL**

**KEMENKUM KALSEL**

#LayananHukumMakinMudah

## Disiplin dan Akuntabilitas Ditekankan dalam Apel Pagi Kemenkum Kalsel



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (9/2/2026) di halaman kantor wilayah. Apel pagi ini diikuti oleh seluruh pegawai sebagai wujud kedisiplinan dan komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara.

Apel pagi dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, M. Rizky Kusuma, dengan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, bertindak sebagai Pembina Apel.

Dalam amanatnya, Anton Edward Wardhana menegaskan bahwa apel pagi merupakan kegiatan rutin yang memiliki makna penting dalam membangun disiplin, tanggung jawab, serta kebersamaan seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sinergi serta kolaborasi seluruh jajaran dalam menyukseskan berbagai kegiatan.

“Sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun ini harus terus kita jaga dan tingkatkan, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Pembina Apel juga mengingatkan seluruh pegawai agar memberikan perhatian serius terhadap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk menjadi perhatian. Ia menekankan pentingnya administrasi yang tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, baik dari sisi operasional, kinerja, maupun administrasi lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Anton juga menyampaikan informasi terkait peluang pengembangan karier bagi pegawai yang berminat beralih ke jabatan fungsional. Ia mengimbau agar pegawai yang berminat dapat mempersiapkan diri dengan baik, seiring adanya informasi mengenai pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional.

Melalui apel pagi ini, diharapkan seluruh pegawai Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan semakin memperkuat komitmen terhadap kedisiplinan, profesionalisme, serta akuntabilitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.



## Perkuat Perencanaan Anggaran, Kemenkum Kalsel Ikuti Supervisi Usulan Belanja TA 2027



Bogor, PPL\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Supervisi Usulan Belanja Modal dan Belanja Sewa Tahun Anggaran 2027 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia di Wisma Pengayoman Kementerian Hukum, Senin (09/02).

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengelola perencanaan dan penganggaran Kanwil Kemenkum Kalsel, di antaranya Ahmad Zubaidi selaku Analis Anggaran Ahli Muda dan Aditya Maulana Sunarko sebagai Analis Anggaran Ahli Pertama. Keduanya berperan aktif dalam memaparkan serta mengkaji usulan belanja modal dan belanja sewa yang telah disusun sesuai kebutuhan dan prioritas satuan kerja.

Supervisi ini bertujuan untuk memastikan usulan anggaran TA 2027 disusun secara akuntabel, terukur, serta selaras dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran nasional. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi forum evaluasi atas kelengkapan data dukung, urgensi kebutuhan, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan secara terpisah menegaskan pentingnya kegiatan supervisi ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Kanwil.

“Supervisi ini menjadi momentum penting bagi jajaran kami untuk memastikan setiap usulan belanja benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil, mendukung kinerja organisasi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” ujar Kakanwil.

la juga berharap melalui pendampingan dan supervisi dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Kanwil Kemenkum Kalsel dapat menyusun perencanaan anggaran TA 2027 yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.

Dengan keikutsertaan aktif dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip good governance.



## Kemenkum Kalsel Tingkatkan Pemahaman Layanan Hukum Masyarakat Loksado



HSS, Humas-Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pentingnya Layanan Hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Senin (9/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya terkait Perkumpulan, Yayasan, dan Perseroan Perorangan.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Kalsel, Dewi Woro Lestari, yang hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemahaman terhadap aspek hukum kelembagaan memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama pelaku usaha dan organisasi sosial, agar dapat menjalankan aktivitas secara tertib, sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pemahaman yang baik terhadap layanan hukum akan memberikan perlindungan hukum, kepastian usaha, serta memperkuat kelembagaan masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan tercipta rasa aman dalam berusaha dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah," ujar Dewi Woro Lestari.

Ia juga menjelaskan bahwa pembentukan badan hukum seperti Perkumpulan dan Yayasan memberikan legitimasi yang diakui negara bagi kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, sehingga pengelolaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Sementara itu, pendirian Perseroan Perorangan dinilai sebagai solusi strategis bagi pelaku usaha mikro dan kecil karena memberikan pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta usaha serta meningkatkan kepercayaan mitra dan lembaga pembiayaan.

Kegiatan ini turut dihadiri dan didukung oleh Ashfia Rohana, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Loksado, yang hadir mewakili Kepala Kecamatan Loksado, serta para kepala desa se-Kecamatan Loksado dan pelaku UMKM desa.



Sebagai pemateri, Dianor, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Kalsel, menyampaikan materi terkait pendirian Perseroan Perorangan, mulai dari manfaat, persyaratan, hingga prosedur pendaftarannya. Materi tersebut dilengkapi dengan pemaparan dari Yudha Alfiani, Notaris PPAT Kabupaten Banjar, yang memberikan penjelasan dari sisi praktik kenotariatan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap terbangun sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem usaha dan kelembagaan yang legal, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## Sesi Diskusi Interaktif Warnai Peningkatan Pemahaman Layanan Hukum di Loksado



HSS, Humas\_Info - Kegiatan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terkait Pentingnya Layanan Hukum yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berlangsung interaktif dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta, Senin (9/2/2026).

Antusiasme tersebut terlihat dari keaktifan peserta yang terdiri dari aparat desa dan pelaku UMKM desa dalam mengikuti pemaparan materi serta sesi diskusi yang berlangsung dinamis. Beragam pertanyaan diajukan peserta, khususnya terkait pendirian badan hukum dan pemanfaatan layanan hukum bagi pengembangan usaha dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Materi utama disampaikan oleh Dianor, Penyuluh Hukum Ahli Muda Kanwil Kemenkum Kalsel, yang memaparkan secara komprehensif mengenai pendirian Perseroan Perorangan. Dalam pemaparannya, Dianor menjelaskan manfaat status badan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil, mulai dari perlindungan hukum, pemisahan harta pribadi dan harta usaha, hingga peningkatan kepercayaan mitra dan lembaga pembiayaan.

Selain itu, Dianor juga memberikan penguatan mengenai keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan dan desa sebagai pusat informasi dan konsultasi layanan hukum bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa Posbankum dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh akses informasi hukum, konsultasi permasalahan hukum, hingga pendampingan awal secara mudah dan terjangkau.

"Posbankum hadir untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Desa dan kelurahan menjadi garda terdepan agar masyarakat tidak ragu mencari informasi dan bantuan hukum secara legal dan tepat," jelas Dianor.

Sementara itu, Yudha Alfiani, Notaris PPAT Kabupaten Banjar, turut memberikan pemaparan dari sisi praktik kenotariatan yang relevan dengan tema kegiatan. Ia menjelaskan peran notaris dalam proses pendirian badan hukum, baik Perkumpulan, Yayasan, maupun Perseroan Perorangan, serta pentingnya kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum agar badan usaha memiliki legitimasi yang kuat.

Yudha juga menekankan bahwa keterlibatan notaris tidak hanya sebatas pembuatan akta, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta meminimalkan risiko permasalahan hukum di kemudian hari, khususnya bagi pelaku UMKM yang tengah mengembangkan usahanya.

Sesi diskusi yang berlangsung aktif tersebut dimoderatori oleh Tulus Achir Cahyadi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kanwil Kemenkum Kalsel, yang memandu jalannya tanya jawab antara peserta dan para narasumber secara komunikatif dan konstruktif.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap pemahaman masyarakat terhadap layanan hukum semakin meningkat, sekaligus mendorong pemanfaatan Posbankum desa sebagai sarana akses keadilan dan penguatan kesadaran hukum di tingkat lokal.



## Bahas Hak Cipta Musik, Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti What's Up Kemenkum Campus Calls Out



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan What's Up Kemenkum Campus Calls Out dengan tema “Royalti Musik di Ruang Publik: Di Mana Batas Keadilan?” yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia secara virtual, Senin (9/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.00 WIB ini diikuti dari Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Forum diskusi ini menjadi wadah strategis untuk memperluas pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap isu kekayaan intelektual, khususnya terkait penerapan royalti musik di ruang publik.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Hukum mendorong peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas penyampaian informasi hukum kepada publik dengan pendekatan yang lebih terbuka dan dialogis. Diskusi menyoroti batas keadilan dalam penerapan royalti musik, dengan mempertimbangkan kepentingan pencipta, pelaku usaha, serta masyarakat sebagai pengguna.

Berbagai pandangan dan perspektif disampaikan oleh narasumber kompeten, disertai partisipasi aktif peserta dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Diskusi berlangsung interaktif dan memberikan ruang klarifikasi terhadap kebijakan serta regulasi yang mengatur hak cipta dan mekanisme pembayaran royalti musik.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendukung penguatan pemahaman dan implementasi kebijakan kekayaan intelektual yang berkeadilan, seimbang, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.



Kegiatan What's Up Kemenkum Campus Calls Out diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum serta mendorong dialog konstruktif terkait isu-isu strategis di bidang kekayaan intelektual.

## Perkuat Keberlanjutan Posbankum, Kanwil Kemenkum Kalsel Koordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel



Banjarbaru, Humas\_Info – Dalam rangka memastikan keberlanjutan operasional Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Kalimantan Selatan pasca peresmian oleh Menteri Hukum Republik Indonesia pada 30 Januari 2026, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (9/2/2026).

Koordinasi tersebut dilaksanakan di Ruang Kerja Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana. Kehadiran Kanwil Kemenkum Kalsel disambut dan diterima oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Guntur Ferry Fahtar, didampingi Kepala Bagian Bantuan Hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi P3H menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyukseskan pelaksanaan Peresmian Pos Bantuan Hukum di Kalimantan Selatan. Ia menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Posbankum dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Diskusi interaktif yang berlangsung membahas rencana tindak lanjut serta langkah-langkah keberlanjutan operasional Posbankum di tingkat desa dan kelurahan, khususnya dalam memastikan empat jenis layanan Posbankum dapat berjalan dengan baik dan dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima layanan hukum.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas persiapan pelaksanaan seleksi Lembaga atau Organisasi Bantuan Hukum yang akan diakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2027. Koordinasi sejak dini dinilai penting agar proses akreditasi dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Topik lain yang turut menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut adalah permasalahan dan kendala dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya terkait pelaporan Kalimantan Selatan melalui sistem e-report yang saat ini masih perlu ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut, disepakati akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan dalam waktu dekat guna memastikan seluruh target kinerja Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum dapat tercapai secara optimal melalui sinergi yang berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



## Bahas Kesiambungan Posbankum, Kanwil Kemenkum Kalsel Koordinasi Teknis dengan Dinas PMD Provinsi



Banjarbaru, PPPH\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus memperkuat implementasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di daerah yang berkesinambungan. Hal tersebut diwujudkan melalui koordinasi teknis pelaksanaan Posbankum bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada Senin (9/2/2026) di Ruang Kerja Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Koordinasi ini merupakan tindak lanjut atas peresmian Posbankum di Kalimantan Selatan oleh Menteri Hukum pada 30 Januari 2026 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto.

Pada kesempatan tersebut, Anton Edward Wardhana menyampaikan pentingnya dukungan lintas sektor guna memastikan layanan Posbankum dapat berjalan optimal di seluruh desa dan kelurahan se-Kalimantan Selatan. Posbankum sendiri memiliki empat layanan utama, yakni informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi dan penyelesaian sengketa, serta pendampingan hukum.

"Kami berharap Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan dapat memberikan dukungan penuh agar seluruh layanan Posbankum dapat berjalan secara efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan," ujar Anton.

Lebih lanjut, Anton menegaskan bahwa peran Dinas PMD sangat strategis dalam mendukung operasional Posbankum, termasuk dalam memfasilitasi pelatihan paralegal serta melakukan pemantauan dan pelaporan aktivitas layanan Posbankum melalui aplikasi yang telah disediakan.



Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan akan menyusun panduan teknis pelaksanaan layanan Posbankum di Kalimantan Selatan, yang selanjutnya akan dimonitor oleh Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Melalui sinergi ini, diharapkan Posbankum dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

## Perkuat Kualitas Kebijakan Hukum, Tim BSK Kanwil Kemenkum Kalsel Ikuti Sosialisasi Pedoman Teknis 2026



Banjarmasin, Humas\_Info – Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Teknis Kegiatan Badan Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Kalsel dari Balai Pertemuan BerAkhlak Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah, sekaligus menyamakan pemahaman dalam mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas dan berbasis data.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan BSK di wilayah pada Tahun 2026 harus dilaksanakan secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan strategis Kementerian Hukum. Pedoman teknis yang disosialisasikan menjadi acuan penting bagi kantor wilayah dalam melaksanakan kegiatan analisis, evaluasi, serta perumusan kebijakan hukum di daerah.

Materi sosialisasi mencakup berbagai pedoman teknis, antara lain pelaksanaan Forum Komunikasi Kebijakan di wilayah, Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan, Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan, serta Diskusi Strategi Kebijakan. Kegiatan juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta dari kantor wilayah untuk menyampaikan masukan dan kendala pelaksanaan di lapangan.



Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Kalsel diharapkan dapat mengimplementasikan seluruh pedoman teknis secara optimal di wilayah, memperkuat sinergi lintas fungsi, serta mendukung pencapaian target kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2026 secara efektif dan berkelanjutan.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Tindak Lanjuti Pengisian ABK untuk Optimalisasi Kinerja



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pengisian Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai tindak lanjut permintaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, pada Selasa (10/2).

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah dipimpin Analis SDMA Madya, Eko Herdianto dan diikuti oleh perwakilan pejabat fungsional serta pengelola kepegawaian di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan pengisian ABK merupakan bagian penting dalam penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan riil organisasi.

Melalui kegiatan ini, setiap unit kerja melakukan perhitungan beban kerja secara objektif sebagai dasar perencanaan sumber daya manusia yang efektif dan akuntabel. Pengisian ABK dilakukan melalui sistem daring yang telah disiapkan dan diinput oleh masing-masing peserta sesuai jabatan dan tugas fungsionalnya. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai jabatan fungsional, mulai dari perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, analis SDM aparatur, analis anggaran, hingga pranata hubungan masyarakat dan pustakawan, sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan perencanaan pegawai yang berbasis data dan kebutuhan organisasi.

Melalui pelaksanaan pengisian Analisis Beban Kerja ini, Kanwil Kemenkum Kalsel berharap dapat menyusun perencanaan kebutuhan pegawai yang lebih tepat sasaran, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum.



## Kanwil Kemenkum Kalsel Raih Predikat Unggul pada Penilaian AIEK Tahun 2025



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menerima hasil penilaian Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (AIEK) yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia.

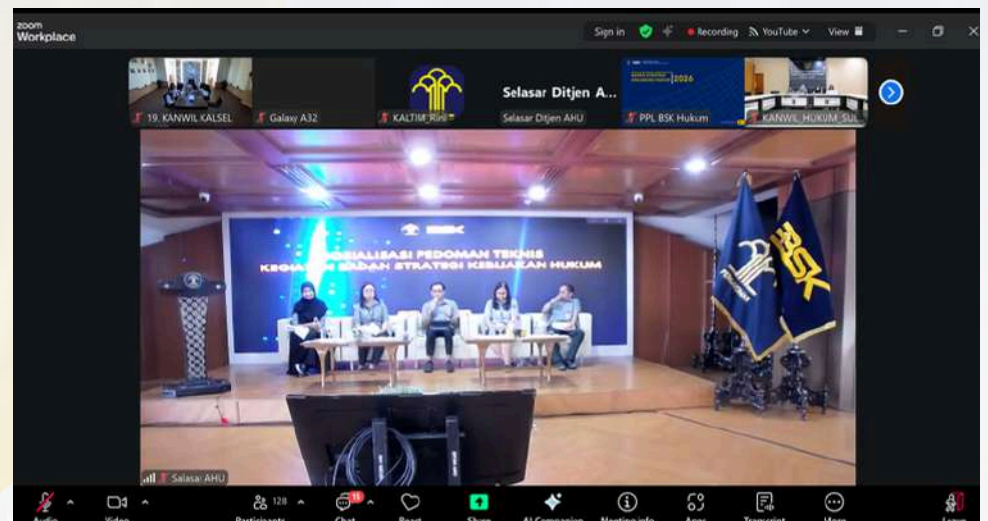
Capaian tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Penilaian AIEK ini merupakan bagian dari upaya penguatan kualitas kebijakan melalui analisis yang sistematis, terukur, dan berbasis data.

Penilaian AIEK dilakukan untuk menilai sejauh mana implementasi kebijakan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan di wilayah.

Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan telah melaksanakan proses implementasi dan evaluasi kebijakan secara terstruktur, didukung dengan koordinasi lintas unit kerja serta pemenuhan indikator penilaian yang ditetapkan. Capaian ini menjadi refleksi atas komitmen jajaran Kanwil Kemenkum Kalsel dalam mendukung pengambilan kebijakan yang berkualitas dan akuntabel.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa hasil penilaian AIEK ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan peran strategis kantor wilayah dalam mendukung perumusan dan evaluasi kebijakan hukum di daerah. Evaluasi kebijakan yang baik diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih tepat serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Ke depan, Kanwil Kemenkum Kalsel akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Strategi Kebijakan Hukum serta para pemangku kepentingan terkait guna memastikan setiap kebijakan yang dilaksanakan di wilayah dapat memberikan manfaat optimal, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi pembangunan hukum di Kalimantan Selatan.



## Kemenkum Kalsel Perkuat Kepastian Hukum Investasi Lewat Harmonisasi Ranperda Balangan



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Selasa (10/2), bertempat di Balai Pertemuan Garuda.

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bahjatul Mardhiah, dan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Balangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Balangan, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel.

Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Balangan, Tuhalus menyampaikan pandangan serta urgensi pembentukan Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, sekaligus meminta saran dan masukan dari para perancang guna penyempurnaan regulasi dimaksud.

Pembahasan rancangan dilakukan secara komprehensif oleh Kelompok Kerja Harmonisasi 2, dengan memberikan tanggapan umum maupun khusus terhadap pasal demi pasal. Sejumlah ketentuan dinilai perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Bahjatul Mardhiah dalam keterangannya menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan regulasi daerah memiliki kepastian hukum dan daya guna.

"Melalui proses harmonisasi ini, kami memastikan Ranperda tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi serta mampu menjawab kebutuhan investasi daerah secara berkelanjutan," ujarnya.

Rapat berlangsung kondusif dan ditutup dengan kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.



## Hasil Harmonisasi Ranperda Penanaman Modal Diserahkan, Siap Jadi Pedoman Investasi Balangan



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal kepada pihak pemrakarsa sebagai dasar perbaikan substansi sebelum tahapan lanjutan.

Hasil harmonisasi menyatakan bahwa Ranperda dimaksud harmonis secara prosedural, sementara dari aspek substansi dan teknik penyusunan dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saran dan masukan yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Harmonisasi, baik dari aspek materi muatan maupun teknik penyusunan, dapat diterima dan disepakati oleh pihak pemrakarsa. Selanjutnya, perbaikan akan segera ditindaklanjuti dan diproses melalui aplikasi e-Harmonisasi.

Ketua Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bahjatul Mardhiah, menegaskan bahwa hasil harmonisasi ini diharapkan mampu menjadi regulasi yang aplikatif.

“Hasil harmonisasi ini kami harapkan dapat menjadi pedoman yang implementatif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung iklim penanaman modal yang sehat di Kabupaten Balangan,” jelasnya.



Dengan diserahkannya hasil harmonisasi ini, diharapkan Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dapat segera disempurnakan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.

## Hadirkan Layanan Hukum bagi Masyarakat Adat, Posbankum Loksado Terus Diperkuat



Loksado, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan terus mendorong keberlanjutan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kecamatan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi yang dilaksanakan di Ruang Kerja Camat Loksado, Selasa (10/2).

Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan di sela-sela pelaksanaan Sosialisasi Pendaftaran Merek Kolektif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Loksado. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalsel, Anton Edward Wardhana, menyempatkan diri untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dengan Camat Loksado, Yosi Rizal, terkait pelaksanaan dan keberlanjutan layanan Posbankum di wilayah tersebut.

Dalam diskusi tersebut, Camat Loksado menyampaikan bahwa keberadaan Posbankum sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam memberikan layanan bantuan hukum yang mudah diakses. Ia meyakini Posbankum memiliki peran strategis dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum di tengah masyarakat Loksado yang heterogen, terdiri dari berbagai latar belakang suku dan budaya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa di Kecamatan Loksado masih banyak berlaku hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi atau denda adat kerap menimbulkan persoalan, bahkan berpotensi merugikan pihak kecamatan apabila tidak dikelola dengan baik dan selaras dengan ketentuan hukum positif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Kalsel menyampaikan harapannya agar Posbankum dapat berperan sebagai jembatan dalam menyelesaikan persoalan hukum adat secara bijaksana. Menurutnya, paralegal yang bertugas di Posbankum dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan Masyarakat Hukum Adat, sehingga tercipta kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat Kecamatan Loksado.



Sebagai tindak lanjut dari koordinasi ini, Camat Loksado menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan guna memastikan layanan Posbankum di Kecamatan Loksado dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

## Penguatan Perlindungan KI, Kanwil Kemenkum Kalsel Lakukan Evaluasi IG Kayu Manis Loksado



Hulu Sungai Selatan, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan monitoring dan pemeriksaan lapangan pasca pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Kayu Manis Loksado di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (10/2).

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum bersama Tim Layanan Kekayaan Intelektual (KI) Kanwil Kemenkum Kalsel, serta melibatkan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kayu Manis Loksado dan perwakilan petani setempat.

Monitoring dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap implementasi perlindungan Kekayaan Intelektual agar tetap sesuai dengan Dokumen Deskripsi yang telah terdaftar. Langkah ini penting untuk menjaga reputasi dan karakteristik khas Kayu Manis Loksado sebagai produk unggulan daerah yang telah memperoleh perlindungan Indikasi Geografis.

Dalam peninjauan tersebut, tim melakukan dialog langsung dengan pengurus MPIG dan para petani terkait konsistensi mutu hasil panen. Pemeriksaan difokuskan pada metode pemanenan, proses pengupasan kulit kayu, hingga tahap pengeringan, guna memastikan standar kualitas tetap terjaga. Ciri khas Kayu Manis Loksado seperti aroma yang tajam serta kadar minyak atsiri yang sesuai standar menjadi perhatian utama dalam evaluasi teknis tersebut.

Selain pemeriksaan kualitas produk, tim juga melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan ekosistem tanaman kayu manis di wilayah Loksado. Evaluasi ini bertujuan mendeteksi potensi penurunan kualitas akibat faktor lingkungan maupun perubahan teknik budidaya, sehingga perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan ekonomi.

Sebagai penutup, tim memberikan arahan kepada MPIG untuk terus memperkuat pengawasan internal, khususnya guna mencegah pencampuran produk dari wilayah lain yang dapat merusak reputasi Indikasi Geografis Kayu Manis Loksado. Dengan pengawasan berkala, diharapkan produk ini tetap memiliki daya saing tinggi serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan petani setempat.



Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalsel dalam memastikan perlindungan Kekayaan Intelektual tidak hanya berhenti pada proses pendaftaran, tetapi juga terimplementasi secara konsisten di lapangan.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Dorong KDMP HSS Daftarkan Merek Kolektif, Perkuat Daya Saing Ekonomi Lokal



Hulu Sungai Selatan, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Layanan Kekayaan Intelektual melaksanakan Sosialisasi Pendaftaran Merek Kolektif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (10/02/2026), bertempat di Aula Kantor Kecamatan Loksado.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan perlindungan hukum koperasi desa/kelurahan melalui pendaftaran merek kolektif sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pimpinan PT. Antang Gunung Meratus, Pimpinan BRI Cabang Kandangan, Pimpinan Bank Kalsel Cabang Kandangan, serta perwakilan pengurus KDMP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Turut hadir Camat Loksado bersama para pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sebagai bagian dari penguatan kelembagaan koperasi.

“Pendaftaran merek kolektif bukan sekadar administrasi, tetapi merupakan langkah strategis untuk memberikan identitas bersama, kepastian hukum, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa koperasi,” tegasnya.

Camat Loksado dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah penguatan koperasi desa melalui perlindungan kekayaan intelektual. Ia menilai, merek kolektif dapat menjadi instrumen penting dalam membangun citra dan daya saing produk unggulan daerah.

Dalam sesi pemaparan materi, Tim Layanan Kekayaan Intelektual menjelaskan secara komprehensif mengenai pengertian merek kolektif, dasar hukum pendaftaran merek, manfaat strategis bagi koperasi, serta prosedur dan persyaratan pendaftarannya. Disampaikan pula bahwa merek kolektif berfungsi sebagai identitas bersama yang membedakan produk atau jasa koperasi dengan pelaku usaha lainnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum atas penggunaan merek secara kolektif.

Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari diskusi yang aktif serta berbagai pertanyaan yang diajukan terkait teknis pendaftaran, pengelolaan merek kolektif, hingga peluang pemanfaatannya dalam pengembangan usaha KDMP.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat, khususnya koperasi desa/kelurahan. Hal ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan perlindungan dan kepastian hukum yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.



## Dukung Pembangunan Ekonomi Banjar, Kemenkum Kalsel Harmonisasi Ranperda Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Banjar tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, bertempat di Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Rabu (11/2/26).

Jalannya rapat harmonisasi diawali dengan arahan dari Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana. Dalam arahnya, Anton menekankan pentingnya harmonisasi sebagai upaya memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

“Rapat harmonisasi ini menjadi ruang penting untuk menyempurnakan substansi Raperda agar memiliki kepastian hukum, sistematika yang baik, serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam mendukung penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah,” ujar Anton Edward Wardhana.

Rapat harmonisasi selanjutnya dipimpin oleh Bahjatul Mardhiah, selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan. Pada sesi pembahasan, perancang memaparkan hasil telaahan dan memberikan sejumlah catatan perbaikan secara redaksional maupun substansi terhadap materi muatan Ranperda.

Dari pihak Pemerintah Kabupaten Banjar, rapat dihadiri oleh Rudy Mulyadi, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar. Ia menyampaikan bahwa penyusunan Ranperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro.

“Ranperda ini kami harapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mendorong kemudahan perizinan, akses permodalan, serta perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro agar mampu tumbuh dan berdaya saing,” kata Rudy Mulyadi.



Melalui rapat harmonisasi ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dapat disempurnakan sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Hasil Harmonisasi Ranperda Koperasi dan Usaha Mikro kepada Pemkab Banjar



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro kepada Pemerintah Kabupaten Banjar, sebagai tindak lanjut pelaksanaan rapat harmonisasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Penyerahan hasil harmonisasi dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan, Anton Edward Wardhana, kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Banjar, Rudy Mulyadi, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar, Rabu (11/2/26).

Anton Edward Wardhana menyampaikan bahwa hasil harmonisasi tersebut memuat penyempurnaan substansi dan redaksional guna memastikan Rancangan Peraturan Daerah telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Penyerahan hasil harmonisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan dalam mendukung pemerintah daerah menghadirkan regulasi yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, dan dapat diimplementasikan secara efektif,” ujar Anton Edward Wardhana.

Ia menambahkan, Ranperda ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang mendukung penguatan peran koperasi dan usaha mikro sebagai penggerak perekonomian daerah.

Sementara itu, Rudy Mulyadi menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan fasilitasi yang diberikan oleh Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan selama proses harmonisasi berlangsung.

“Kami mengapresiasi masukan dan penyempurnaan yang telah diberikan. Hasil harmonisasi ini akan menjadi dasar penting bagi kami untuk melanjutkan pembahasan Ranperda pada tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Rudy Mulyadi.



Dengan diserahkannya hasil harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Banjar selanjutnya akan menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk diproses lebih lanjut bersama DPRD Kabupaten Banjar hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

## Perkuat Kepercayaan Diri, Peserta Pemagangan Nasional di Kanwil Kemenkum Kalsel Simak Kegiatan Maganghub Soft Skill Programme



Banjarmasin, Humas\_Info – Peserta Program Pemagangan Nasional atau MagangHub Batch 3 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Maganghub Soft Skill Programme bertema “Self Efficacy” yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia secara daring pada Rabu (11/02/2026).

Kegiatan ini diikuti oleh para peserta magang secara virtual dari masing-masing unit kerja dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kementerian Ketenagakerjaan RI. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas soft skill peserta magang, khususnya dalam membangun keyakinan diri, kesiapan mental, serta kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Maganghub Soft Skill Programme menghadirkan Retno Dwiyanti Setyaningsih, akademisi dari IPMI International Business School, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, narasumber menekankan pentingnya self efficacy sebagai fondasi utama dalam pengembangan diri, pengambilan keputusan, serta peningkatan kinerja individu di lingkungan profesional.

Keikutsertaan Peserta Pemagangan Nasional di Kanwil Kemenkum Kalsel dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kompetensi peserta magang, tidak hanya pada aspek pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga pada penguatan karakter, kepercayaan diri, dan sikap profesional pada lingkungan kerja.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta magang mampu mengimplementasikan nilai-nilai self efficacy dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama mengikuti program magang, serta menjadikannya sebagai bekal penting dalam memasuki dunia kerja setelah masa pemagangan berakhir.



## Menkum di Rapim POLRI: KUHP-KUHAP Baru Perkuat Kepastian Hukum untuk Pangan dan Energi



Jakarta – Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi instrumen strategis dalam mendukung kedaulatan pangan dan energi nasional.

“KUHP dan KUHAP yang baru akan meningkatkan kepastian hukum dalam kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif,” ujar Supratman di Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2026 di Grand Krakatau Ballroom, Jakarta, Rabu (11/02/2026).

Menurutnya, agenda pembangunan nasional tahun 2026 yang mengusung tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif membutuhkan dukungan regulasi yang efektif. Reformasi hukum, termasuk melalui pembaruan KUHP dan KUHAP, menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum serta iklim usaha yang kondusif.

Ia menyoroti masih adanya persoalan regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi dan daya saing nasional, seperti aturan yang tumpang tindih, multitafsir, hingga menimbulkan biaya tinggi. Karena itu, deregulasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan struktural dan memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah.

Di bidang pangan, tantangan regulasi masih terlihat dari adanya tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, disharmoni regulasi antarkementerian, rumitnya perizinan dan rantai distribusi, dan bantuan serta subsidi yang tidak tepat sasaran.

“Langkah deregulasi yang dibutuhkan dalam sektor pangan meliputi penyederhanaan rantai distribusi pangan, penyederhanaan perizinan usaha pertanian dan industri pangan, pengurangan biaya transaksi, pemajuan investasi di sektor agroindustri dan pangan, dan penguatan kepastian hukum bagi investor,” tuturnya.

Kemudian di bidang energi, lanjut Supratman, arah deregulasi nasional menasar sektor minyak dan gas bumi, serta ketenagalistrikan. Ia menjelaskan, di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia mengalami tantangan menurunnya kapasitas produksi nasional sehingga ketahanan energi nasional berada pada kondisi rentan. Sementara itu di sektor ketenagalistrikan, masih terdapat kerugian negara hingga ketidakpastian hukum kontraktual. Supratman mengatakan, deregulasi menjadi jalan keluar strategis untuk mendukung penguatan kedaulatan energi.

“Deregulasi di bidang energi menasar beberapa hal, seperti perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, integrasi perizinan, penyusunan kerangka hukum yang mengatur interkoneksi dan supergrid, dan regulasi khusus sistem penyimpanan energi baterai,” jelas Supratman.

Ia menekankan, kepastian hukum yang diperkuat melalui implementasi KUHP dan KUHAP baru akan memberikan landasan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah, termasuk di bidang pangan dan energi.

Di samping itu, Supratman juga merangkul Polri dalam mendukung deregulasi dan memastikan penegakan hukum berjalan sejalan dengan agenda pembangunan nasional.



## Kakanwil Kemenkum Kalsel Hadiri Lokakarya KUHP dan KUHP Baru di UGM



Yogyakarta, Humas\_Info – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menghadiri kegiatan Lokakarya KUHP dan KUHP Baru yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Balai Pelatihan Hukum Semarang, serta Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Asperhupiki).

Kegiatan yang mengangkat tema “Menyelaraskan Paradigma dan Asas dalam Pendidikan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana” ini dilaksanakan pada Selasa hingga Kamis, 10–12 Februari 2026, bertempat di Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Lokakarya tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum seluruh Indonesia serta para dosen Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, Wakil Dekan I Fakultas Hukum UGM, Ketua Umum Asperhupiki, serta Kepala Balai Pelatihan Hukum Semarang.

Dalam sambutannya, Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, khususnya dalam menyongsong implementasi KUHP dan KUHP baru. “Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyinergikan ruang akademik dan birokrasi. Kehadiran para dosen Fakultas Hukum dan Kepala Kantor Wilayah merupakan wujud nyata kolaborasi dalam memastikan implementasi KUHP dan KUHP baru berjalan optimal,” ujarnya.

Ia juga berharap para peserta mampu mengimplementasikan sekaligus mensosialisasikan substansi dan semangat pembaruan yang terkandung dalam KUHP dan KUHP baru kepada masyarakat luas. Keberhasilan regulasi tersebut, lanjutnya, sangat bergantung pada peningkatan dan perluasan pemahaman publik terhadap norma dan asas yang diatur di dalamnya.

Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan materi dari para profesor dan doktor yang memiliki kompetensi serta keahlian di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Diskusi berlangsung secara intensif, membahas penyelarasan paradigma, asas, serta pendekatan pembelajaran yang relevan dengan dinamika sistem hukum nasional.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran Kanwil dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHP baru.



“Lokakarya ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi antara akademisi dan aparat pemerintah. Kami di daerah memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan semangat pembaruan KUHP dan KUHP baru ke dalam langkah konkret, baik melalui sosialisasi maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tegas Alex.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara ruang akademik dan birokrasi menjadi kunci agar implementasi KUHP dan KUHP baru tidak hanya berjalan secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memperkuat kepastian dan perlindungan hukum di daerah.

## Harmonisasi RDTR Sengayam dan Serongga, Kemenkum Kalsel Pastikan Kesesuaian Regulasi



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kotabaru pada Kamis (12/2/2026) bertempat di Balai Pertemuan Garuda Kanwil Kemenkum Kalsel.

Rapat harmonisasi dipimpin oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, beserta tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Kalsel. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Minggu Basuki, Kepala Bagian Hukum Mahmoeri Zulmana, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Adapun dua Ranperbup yang dibahas yakni Ranperbup tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Sengayam Tahun 2025–2045 dan Ranperbup tentang RDTR Wilayah Perencanaan Serongga Tahun 2025–2045.

Dalam forum tersebut, tim perancang melakukan pencermatan terhadap kesesuaian substansi, sistematika, serta teknik penyusunan peraturan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan dokumen RDTR yang disusun memiliki kepastian hukum, tidak bertentangan dengan regulasi nasional, serta mampu menjadi instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kotabaru hingga tahun 2045.



Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan pembahasan teknis yang mendalam guna menyempurnakan materi muatan kedua Ranperbup tersebut sebelum ditetapkan.

## Kanwil Kemenkum Kalsel Serahkan Naskah Hasil Harmonisasi Dua Ranperbup RDTR Kotabaru



Banjarmasin, Humas\_Info – Usai pelaksanaan rapat harmonisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan naskah hasil harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Kotabaru tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Sengayam dan Wilayah Perencanaan Serongga Tahun 2025–2045.

Penyerahan naskah dilakukan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Bahjatul Mardhiah, kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Minggu Basuki serta Kepala Bagian Hukum Mahmoeri Zulmana beserta jajarannya.

Naskah hasil harmonisasi tersebut telah melalui proses pencermatan dan penyempurnaan dari aspek substansi, redaksional, maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyempurnaan ini bertujuan agar Ranperbup memiliki landasan hukum yang kuat serta dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengaturan tata ruang wilayah.

Dengan diserahkannya naskah hasil harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru diharapkan dapat segera menindaklanjuti proses penetapan kedua Ranperbup tersebut sebagai instrumen hukum dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Sengayam dan Serongga.



Kanwil Kemenkum Kalsel terus berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah guna mendukung terwujudnya regulasi yang berkualitas, harmonis, dan implementatif di wilayah Kalimantan Selatan.

## Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan Ikuti Munggahan dan Silaturahmi Kemenkum RI Secara Daring, Sambut Ramadhan 1446 H



Banjarmasin, Humas\_Info – Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1446 H/2026 M, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Munggahan dan Silaturahmi Pegawai Kementerian Hukum RI secara daring pada Kamis (12/2/2026). Kegiatan terpusat di Graha Pengayoman Kemenkum RI dan diikuti oleh seluruh unit kerja Kemenkum se-Indonesia.

Dari Banjarmasin, kegiatan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan yang berkumpul di Balai Pertemuan Garuda. Suasana khidmat dan penuh kebersamaan mewarnai rangkaian acara yang menjadi momentum spiritual menjelang datangnya bulan suci. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, hadir langsung dan menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran agar menjadikan Ramadhan sebagai sarana peningkatan kualitas diri, baik secara spiritual maupun profesional.

“Ramadhan adalah momentum untuk membersihkan hati, memperkuat integritas, serta meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Mari kita sambut bulan suci ini dengan kesiapan lahir dan batin serta komitmen untuk bekerja lebih baik,” ujar Supratman.

Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan santunan kepada anak yatim yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum didampingi jajaran pimpinan sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi menjelang Ramadhan.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiyah dan siraman rohani yang memberikan penguatan nilai-nilai bulan Ramadhan dan keikhlasan dalam menunaikan ibadah.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa momentum munggahan ini menjadi sarana mempererat ukhuwah dan soliditas antar pegawai.

“Kegiatan ini bukan sekadar tradisi menyambut Ramadhan, tetapi juga momentum refleksi untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan semangat kerja. Kami berharap seluruh jajaran dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan sekaligus tetap memberikan pelayanan hukum terbaik kepada masyarakat,” ungkap Alex.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya kerja yang harmonis, berintegritas, dan penuh kebersamaan dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan hukum kepada masyarakat, sejalan dengan nilai-nilai pengayoman yang menjadi landasan Kementerian Hukum RI.



## Sinergi Pusat dan Wilayah, Kanwil Kemenkum Kalsel Dukung Penyempurnaan Aplikasi IRH



Banjarmasin, Humas\_Info — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Ketua Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kanwil Kemenkum Kalsel, Nizar Al Farisy beserta tim mengikuti Rapat Persiapan Aplikasi Indeks Reformasi Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) secara virtual, Kamis (12/02).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan Aplikasi Indeks Reformasi Hukum serta menginventarisasi kebutuhan fitur Tim Sekretariat Wilayah dalam aplikasi dimaksud. Rapat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting tersebut diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia untuk memastikan kesiapan teknis dan substansi dalam pengembangan aplikasi.

Melalui kegiatan ini, BPHN menekankan pentingnya penyempurnaan sistem aplikasi IRH guna mendukung proses pengukuran reformasi hukum di daerah secara lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel. Inventarisasi kebutuhan fitur menjadi langkah strategis agar aplikasi mampu menjawab kebutuhan riil di tingkat wilayah, khususnya dalam proses penginputan, verifikasi, dan pemantauan data.

Keikutsertaan Tim Kerja Penilaian IRH Kanwil Kemenkum Kalsel merupakan bentuk komitmen dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan Indeks Reformasi Hukum di daerah. Dengan adanya penguatan aplikasi dan koordinasi yang intensif antara pusat dan wilayah, diharapkan proses penilaian IRH Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif serta mendorong peningkatan kualitas reformasi hukum di Kalimantan Selatan.



## Dukung Akuntabilitas Tata Kelola Daerah, Kanwil Kemenkum Kalsel Harmonisasikan Ranperda Tapin Tahun 2026



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Kerja Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026, Selasa (12/02), bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektorat Kabupaten Tapin dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Pembahasan dibuka oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Anton Edward Wardhana, yang menekankan pentingnya keselarasan regulasi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Kelompok Kerja Harmonisasi 1 melakukan pembahasan secara komprehensif, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan. Evaluasi dilakukan secara rinci pasal demi pasal guna memastikan materi muatan telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Beberapa ketentuan masih memerlukan pengkajian lebih lanjut agar tidak menimbulkan disharmonisasi norma. Namun secara prosedural, rancangan peraturan daerah tersebut dinyatakan telah memenuhi ketentuan.

“Saya mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin dalam menyusun regulasi yang berkualitas. Harmonisasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap norma yang diatur memiliki kepastian hukum dan implementatif di lapangan,” ujar Anton Edward Wardhana.

Rapat berlangsung kondusif dan ditutup dengan kesepakatan bahwa pemrakarsa akan segera melakukan penyesuaian untuk selanjutnya diproses melalui aplikasi e-harmonisasi.



## Hasil Harmonisasi Ranperda Tapin Diserahkan, Wujud Sinergi Regulasi yang Berkualitas



Banjarmasin, Humas\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menyerahkan hasil harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 kepada pihak pemrakarsa sebagai tindak lanjut rapat harmonisasi yang telah dilaksanakan.

Penyerahan hasil harmonisasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa substansi dan teknik penyusunan peraturan daerah telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hasil pembahasan, Ranperda tersebut dinyatakan harmonis dari aspek prosedural. Adapun dari aspek substansi dan teknik penyusunan, dinyatakan harmonis setelah dilakukan penyesuaian sesuai dengan hasil pembahasan dan rekomendasi tim perancang peraturan perundang-undangan.

Anton Edward Wardhana selaku Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyampaikan bahwa proses harmonisasi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga kualitas regulasi daerah.

"Hasil harmonisasi ini diharapkan menjadi dasar penyempurnaan substansi sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar aplikatif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel," ungkapnya.

Dengan diserahkannya hasil harmonisasi ini, Pemerintah Kabupaten Tapin diharapkan segera menindaklanjuti perbaikan substansi sebelum memasuki tahapan pembentukan berikutnya.



## KI Jadi Payung Hukum Ekspresi Budaya, Kemenkum Kalsel Dorong Guru Seni Catatkan Karya



Barabai-Amuntai, KI\_Info - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melalui Tim Pelayanan Kekayaan Intelektual turut berperan sebagai narasumber dalam Kegiatan Ruang Ekspresi Budaya Bersama Guru Seni Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Bidang Kebudayaan, Rabu-Kamis (11-12/02).

Kegiatan hari pertama dilaksanakan di SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan hari kedua di SMK Negeri 2 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peserta terdiri dari unsur DPRD, perangkat daerah, seniman/budayawan, akademisi, serta guru seni se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kasi Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait peran legislatif dalam pemajuan kebudayaan daerah.

Pada kesempatan tersebut, Tim Pelayanan KI Kanwil Kemenkum Kalsel yang diwakili oleh Alvioneda Rennar Putri menyampaikan materi mengenai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan Hak Cipta. Dalam paparannya, narasumber mengajak para guru seni, seniman, serta pemerintah daerah untuk aktif mencatatkan karya cipta, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, serta potensi indikasi geografis agar memperoleh perlindungan hukum yang sah dan tertulis.

"Guru seni dan para seniman memiliki peran strategis dalam melahirkan karya kreatif berbasis budaya lokal. Melalui pencatatan hak cipta dan KIK, kita tidak hanya melindungi karya, tetapi juga menjaga identitas budaya daerah agar tidak diklaim pihak lain," ujar Alvioneda.

Ia juga menegaskan bahwa pencatatan kekayaan intelektual merupakan langkah preventif untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta sehingga tidak ada lagi karya yang dimanfaatkan tanpa izin atau tanpa pengakuan yang layak.

Kegiatan semakin interaktif dengan pemaparan dan praktik ragam gerak tari oleh akademisi dan seniman daerah, yang mengajak para guru untuk langsung mengeksplorasi kreativitas seni tari dan musik. Antusiasme peserta terlihat dalam sesi tanya jawab, khususnya terkait tata cara, alur, serta persyaratan pencatatan hak cipta.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan mendorong peningkatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat, khususnya di wilayah Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara.

Sinergi antara pemerintah daerah, pendidik, dan pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum terhadap karya seni dan budaya daerah, sekaligus mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan di Kalimantan Selatan.



## Penguatan Koordinasi Nasional, Kanwil Kemenkum Kalsel Mendukung Penuh Penyusunan Peta Permasalahan Hukum Bersama BPHN



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Penyusunan Peta Permasalahan Hukum (PPH) yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Jum'at (13/02/2026) secara daring.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Permenkum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum, yang menegaskan bahwa penyusunan PPH dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, program prioritas pemerintah, serta hasil evaluasi tahun sebelumnya.

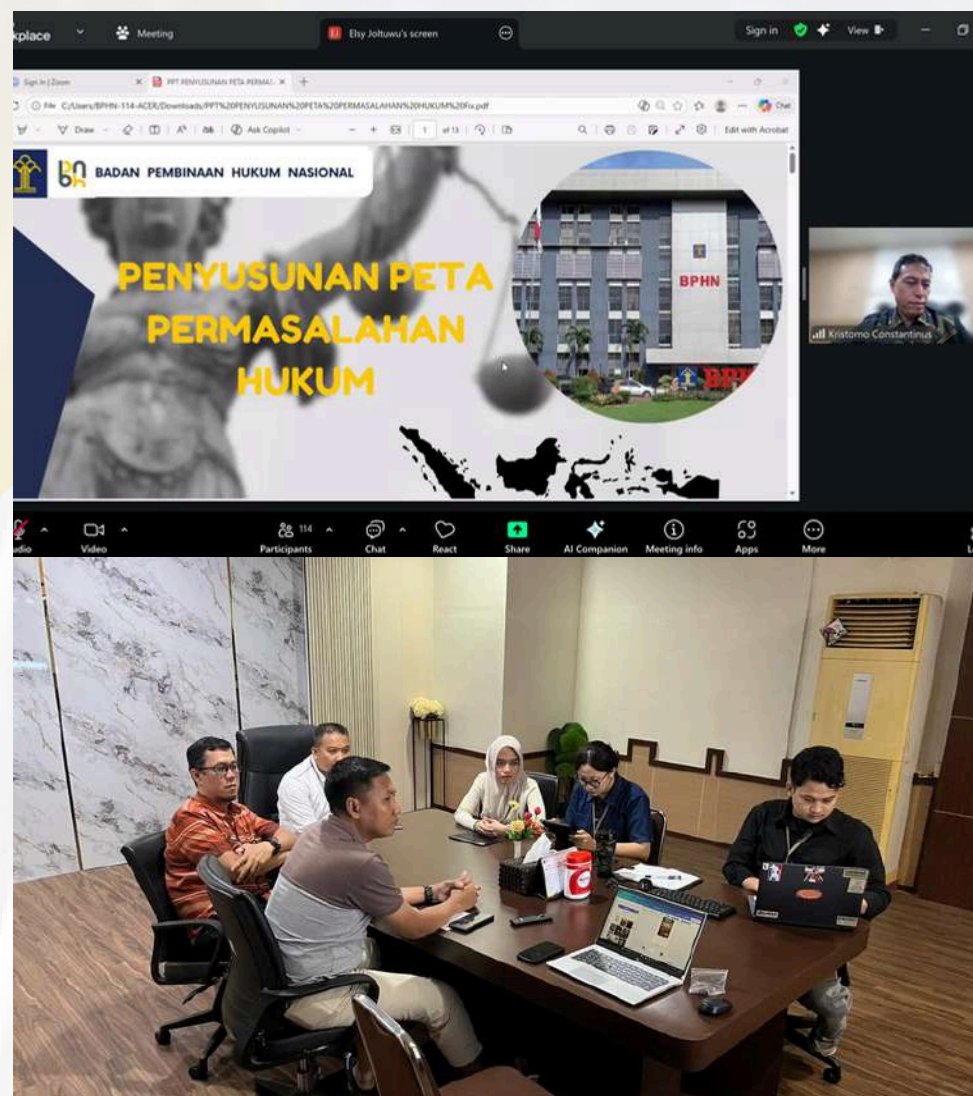
Pada rapat tersebut disampaikan bahwa BPHN akan menyediakan aplikasi khusus sebagai sarana pengumpulan dan pelaporan data secara terintegrasi. Data yang dihimpun bersumber dari berbagai instansi, antara lain Kepolisian Daerah, Pengadilan Negeri, BNNP, BP3MI, jajaran Pemasarakatan dan Imigrasi, serta dinas terkait lainnya. Selain itu, data layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang secara nasional mencapai sekitar 10.000 laporan per hari turut menjadi bagian penting dalam pemetaan permasalahan hukum.

Kanwil Kemenkum Kalsel turut berperan melakukan inventarisasi dan klasifikasi data permasalahan hukum berdasarkan jenis dan jumlah kasus, termasuk menggali informasi dari musyawarah desa dan pemerintah daerah. Laporan pelaksanaan kegiatan akan disampaikan kepada BPHN sesuai mekanisme dan jadwal yang telah ditetapkan.

Melalui penyusunan PPH, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai permasalahan hukum di daerah, sehingga program penyuluhan hukum dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. BPHN menegaskan bahwa penyusunan PPH dapat menjadi unsur penting dalam memastikan berjalannya keadilan dan kepastian hukum.

“Pentingnya bahwa terkait PPH ini menjadi kepentingan nasional” tegas BPHN melalui pertemuan secara daring.

Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen mendukung penuh kebijakan nasional ini sebagai bagian dari upaya bersama membangun sistem hukum yang responsif, transparan, dan berkeadilan.



## 31 Notaris Baru Dilantik, Kakanwil Kemenkum Kalsel Tekankan Integritas dan Profesionalisme



Banjarmasin, Humas\_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan para Notaris baru Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Galaxy Hotel Banjarmasin, Jumat (13/2/2026).

Sebanyak 31 (tiga puluh satu) notaris resmi dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem. Para notaris tersebut akan bertugas di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan rincian: Kota Banjarbaru (1 orang), Kabupaten Balangan (1 orang), Kabupaten Banjar (2 orang), Kabupaten Barito Kuala (2 orang), Kabupaten Tapin (2 orang), Kabupaten Tabalong (2 orang), Kabupaten Kotabaru (2 orang), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (4 orang), Kabupaten Tanah Laut (4 orang), Kabupaten Tanah Bumbu (5 orang), dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (6 orang).

Dengan pelantikan ini, jumlah notaris di Provinsi Kalimantan Selatan kini mencapai 340 orang yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Alex menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung ketertiban hukum di masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jabatan notaris bukan sekadar profesi administratif, melainkan amanah negara yang menuntut integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah penekanan turut disampaikan kepada para notaris, baik yang baru dilantik maupun yang telah lama menjabat. Di antaranya terkait kepatuhan terhadap ketentuan wilayah jabatan, pengelolaan dan penyimpanan protokol notaris sebagai arsip negara, kewajiban penyampaian laporan bulanan, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan oleh tim pengawas.

Secara khusus, kepada para notaris yang baru diangkat, ditekankan pentingnya penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam mencegah penyalahgunaan akta untuk kepentingan yang melanggar hukum. Penerapan prinsip ini diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas serta menjaga marwah jabatan notaris.

Kegiatan pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat manajerial dan nonmanajerial di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalsel, unsur organisasi kenotariatan, Majelis Pengawas Daerah Notaris, rohaniawan, serta tamu undangan lainnya.

Melalui momentum ini, Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan berharap para notaris yang baru dilantik dapat menjadi agen perubahan dalam pelayanan hukum, serta berkontribusi dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Selatan.



## Jumlah Notaris Bertambah, Diharapkan Meningkatkan Kualitas Layanan Kenotariatan di Kalimantan Selatan



Banjarmasin, Humas\_Info – Upaya memperkuat layanan hukum di daerah terus dilakukan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan kembali menambah formasi notaris melalui Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Galaxy Hotel Banjarmasin, Jumat (13/2/2026).

Sebanyak 31 notaris baru resmi dilantik untuk mengisi kebutuhan pelayanan kenotariatan di sejumlah kabupaten/kota, dengan Hulu Sungai Selatan menjadi daerah yang mendapatkan penambahan jumlah notaris paling banyak kali ini dengan dilantiknya 6 notaris untuk wilayah kerja tersebut. Penambahan ini menjadi langkah strategis dalam pemerataan akses layanan hukum, khususnya dalam pembuatan akta otentik dan pelayanan pembuatan hukum masyarakat.

Berdasarkan data pelantikan, selain Hulu Sungai Selatan, distribusi notaris yang dilantik meliputi Kota Banjarbaru (1), Kabupaten Balangan (1), Kabupaten Banjar (2), Kabupaten Barito Kuala (2), Kabupaten Tapin (2), Kabupaten Tabalong (2), Kabupaten Kotabaru (2), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (4), Kabupaten Tanah Laut (4), dan Kabupaten Tanah Bumbu (5).

Dengan bertambahnya notaris tersebut, jumlah notaris di Kalimantan Selatan kini mencapai 340 orang, yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Dalam arahnya, Alex Cosmas Pinem selaku Kepala Kantor Wilayah menekankan bahwa pelantikan ini bukan hanya seremonial, melainkan bagian dari penguatan kualitas layanan hukum. Notaris diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta menjaga marwah jabatan sebagai pejabat umum.

Selain itu, disampaikan pula sejumlah aspek pembinaan yang harus menjadi perhatian bersama, antara lain kepatuhan terhadap ketentuan wilayah jabatan, pengelolaan protokol notaris sebagai arsip negara, kewajiban pelaporan bulanan, hingga tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pengawasan. Penekanan khusus juga diberikan terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) sebagai bentuk kehati-hatian dalam mencegah potensi penyalahgunaan akta dan menjaga integritas profesi.



Pelantikan ini menjadi momentum pembenahan dan peningkatan kualitas layanan kenotariatan di Kalimantan Selatan. Dengan distribusi notaris yang semakin merata, diharapkan masyarakat di berbagai daerah dapat memperoleh pelayanan hukum yang profesional, akuntabel, berintegritas dan berkualitas.

## Kementerian Hukum Raih Dua Gold pada PR INDONESIA Awards



Yogyakarta – Kementerian Hukum (Kemenkum) meraih dua penghargaan Gold dalam ajang PR INDONESIA Awards (PRIA) 2026 yang diselenggarakan oleh PR INDONESIA Group.

Penghargaan Gold pertama diperoleh pada Kategori Kanal Digital – Subkategori Media Sosial untuk kanal YouTube Kementerian Hukum. Selain itu, penghargaan Gold kedua diraih pada Kategori Owned Media – Subkategori Video Profile melalui video berjudul Hukum Asli Indonesia.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Ronald Lumbuun, menyatakan bahwa komunikasi publik di bidang hukum harus mampu menjembatani bahasa regulasi dengan kebutuhan masyarakat.

“Komunikasi publik di bidang hukum tidak boleh berhenti pada penyampaian informasi normatif. Kami berupaya menghadirkan konten yang kontekstual, mudah dipahami, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujar Ronald di usai menerima penghargaan di Taman Budaya Embung Giwangan, Yogyakarta, Jumat (13/02/26).

Menurutnya, pemanfaatan kanal digital menjadi bagian dari strategi untuk memperluas akses informasi hukum sekaligus memperkuat literasi hukum publik.

“Kami memanfaatkan platform digital agar informasi hukum dapat diakses lebih cepat, menjangkau lebih luas, dan disampaikan dengan pendekatan yang lebih komunikatif,” katanya.

Ia menjelaskan, kanal YouTube Kementerian Hukum saat ini memuat beragam informasi publik, mulai dari sosialisasi regulasi baru, layanan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan hukum, hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Ronald juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima serta menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif.

“Puji syukur, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh tim serta dukungan masyarakat. Capaian ini tidak lepas dari kolaborasi dan dedikasi seluruh jajaran yang terlibat dalam pengelolaan komunikasi publik. Terima kasih kepada PR INDONESIA dan para dewan juri atas kepercayaan yang diberikan. Bagi kami, komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan,” ujarnya.

PR INDONESIA Awards merupakan kompetisi kehumasan nasional yang digelar sejak 2016 dan menjadi salah satu tolok ukur kinerja komunikasi di Indonesia. Penghargaan diberikan melalui proses penjurian oleh praktisi dan akademisi komunikasi nasional.



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan apresiasi atas raih dua penghargaan Gold Kementerian Hukum RI pada ajang PR INDONESIA Awards 2026. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi publik Kementerian Hukum semakin adaptif, inovatif, dan mampu menjembatani substansi hukum dengan kebutuhan masyarakat.



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

**#** bangga  
melayani  
bangsa



Terhubung lebih dekat: [YouTube](#) [f](#) [@](#) [X](#) **KEMENKUMKALSEL**